

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Liberalisasi perdagangan merupakan salah satu kebijakan yang bertujuan untuk mempermudah proses perdagangan internasional. Carbaugh, (2009) menyatakan bahwa kebijakan liberalisasi perdagangan ditunjukkan dengan adanya pengurangan bahkan penghapusan hambatan perdagangan, baik hambatan tarif maupun non tarif. Disisi lain, liberalisasi perdagangan menjadi salah satu perubahan penting yang dapat membantu pemulihan perekonomian negara Beyer dkk., (1999), dan mempercepat pertumbuhan ekonomi (Perera dkk., 2014; Liyanaarachchi dkk., 2016; Shuaibu, 2017; Yameogo & Omojolaibi, 2020). Terdapat tiga pendekatan yang sering digunakan untuk melihat liberalisasi perdagangan, 1) pengurangan tarif perdagangan, 2) penghapusan subsidi ekspor, 3) penghapusan pembatasan kuota dari negara pengimpor (Acharya dkk., 2012)

General Agreement on Tariff and Trade (GATT) menjadi awal mula liberalisasi perdagangan. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh 23 negara pada tahun 1947 dengan hasil pengurangan tarif perdagangan. Saat ini, hampir seluruh negara maju dan sebagian negara berkembang telah menerapkan tarif terikat (Krugman dkk., 2012). Selanjutnya, pada tahun 1995 didirikan *World Trade Organization (WTO)* untuk mengelola dan meneruskan perjanjian GATT.

Keputusan untuk masuk dalam organisasi perdagangan dunia harus didasarkan atas keuntungan dan kerugian yang akan diperoleh. Keuntungan dari perdagangan internasional digambarkan melalui beberapa sumber. Yang pertama, dari sisi publik liberalisasi perdagangan berdampak pada peningkatan penyediaan fasilitas maupun layanan publik (Durongkaveroj & Ryu, 2019). Sedangkan dari sisi ekspor dan impor, liberalisasi perdagangan memacu peningkatan rasio ekspor ke negara lain Fischer, (2001); Nahar & Siriwardana, (2009); Modeste, (2019); Takahashi, (2021) dan mempermudah ekspor impor, sehingga peningkatan surplus barang dapat menurunkan harga barang (Alam Adha dkk., 2018). Pada jangka panjang hal tersebut akan berdampak terhadap peningkatan permintaan

internasional dari barang dan jasa yang diperdagangkan, sehingga pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat meningkat (Gnangnon, 2019).

Tabel 1.1
Daftar Organisasi dan Perjanjian Dagang Internasional yang Diikuti Indonesia

No	Nama Organisasi Internasional	Tahun Bergabung
1.	<i>Asian and Pacific Coconut Community (APCC)</i>	1969
2.	<i>Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC)</i>	1970
3.	<i>International Pepper Community (IPC)</i>	1977
4.	<i>ASEAN Promotion Centre on Trade, Investments and Tourism (APCTIT) / ASEAN – Japan Centre</i>	1981
5.	<i>International Textiles and Clothing Bureau (ITBC)</i>	1984
6.	<i>World Trade Organization (WTO)</i>	1995
7.	<i>ASEAN – Korea Centre</i>	2008

Sumber: Kementerian Luar Negeri

Pada tabel 1.1 di atas menunjukkan daftar organisasi dan perjanjian dagang internasional yang diikuti oleh Indonesia. Berdasarkan data tersebut, sejak tahun 1969 Indonesia sudah aktif dalam perjanjian dagang internasional dan organisasi perdagangan internasional. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia perekonomian Indonesia sudah mengarah pada perekonomian terbuka. Keikutsertaan Indonesia dalam organisasi dan perjanjian dagang internasional tentu saja didasarkan atas keuntungan yang akan diperoleh.

Selain berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, liberalisasi perdagangan juga memiliki dampak terhadap kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Ketika negara mulai menerapkan liberalisasi perdagangan, maka hal tersebut akan memberikan dua dampak yang berbeda terhadap ketimpangan pendapatan. Yang pertama liberalisasi perdagangan dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan khususnya di negara maju karena keterbukaan menyebabkan peningkatan permintaan tenaga kerja terampil, sehingga ketimpangan pendapatan antara tenaga kerja terampil dan tidak terampil semakin tinggi (Le dkk., 2020). Pandangan kedua menyatakan bahwa liberalisasi perdagangan akan menurunkan ketimpangan pendapatan di negara di negara

berkembang (Anderson, 2020). Hal tersebut disebabkan karena negara berkembang cenderung memperdagangkan barang padat karya yang diproduksi oleh tenaga kerja tidak terampil (Kumar & Mishra, 2008).

Pada penelitian lain, dampak liberalisasi perdagangan turut dianalisis pengaruhnya terhadap kemiskinan yang juga menghasilkan pandangan berbeda. Pertama, pertumbuhan ekonomi akibat dari liberalisasi perdagangan akan menurunkan tingkat kemiskinan melalui peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja (Adha dkk., 2018; Wang & Hu, 2018; Gnanon, 2019). Liberalisasi perdagangan juga mempermudah masuknya barang impor dengan harga yang lebih murah, sehingga konsumsi masyarakat akan meningkat (Gnanon, 2019). Pandangan kedua menyatakan hal yang bertentangan, bahwa liberalisasi perdagangan akan memperburuk kemiskinan melalui perubahan teknologi. Salah satu cara agar perusahaan mencapai tingkat efisiensi adalah dengan penggunaan teknologi dan penyerapan tenaga kerja terampil. Dalam kasus ini, maka tenaga kerja tidak terampil akan kehilangan kesempatan untuk bekerja dan kemiskinan semakin parah (Wang & Hu, 2018).

Berdasarkan topik penelitian yang diangkat, teori Heckscher-Ohlin-Samuelson dapat menjelaskan hubungan antara liberalisasi perdagangan dengan ketimpangan dan kemiskinan. Teori tersebut menyatakan bahwa negara akan cenderung melakukan ekspor terhadap produk keunggulan komparatifnya (Krugman dkk., 2012). Teori tersebut juga memprediksi pola perdagangan yang terjadi antara negara maju dan negara berkembang. Umumnya negara maju dengan tenaga kerja terampil yang melimpah cenderung memproduksi dan mengekspor produk padat modal. Untuk menyeimbangkan pola perdagangan, maka negara berkembang dengan tenaga kerja tidak terampil yang lebih dominan akan memperdagangkan barang padat karya. Dalam hal ini, tenaga kerja menjadi salah satu faktor produksi yang dipertimbangkan dalam perdagangan internasional (Carbaugh, 2009).

Prediksi teori Heckscher-Ohlin-Samuelson terhadap ketimpangan di negara maju dan berkembang berbeda. Untuk kasus negara maju, teori tersebut menyatakan jika liberalisasi perdagangan akan memperparah ketimpangan

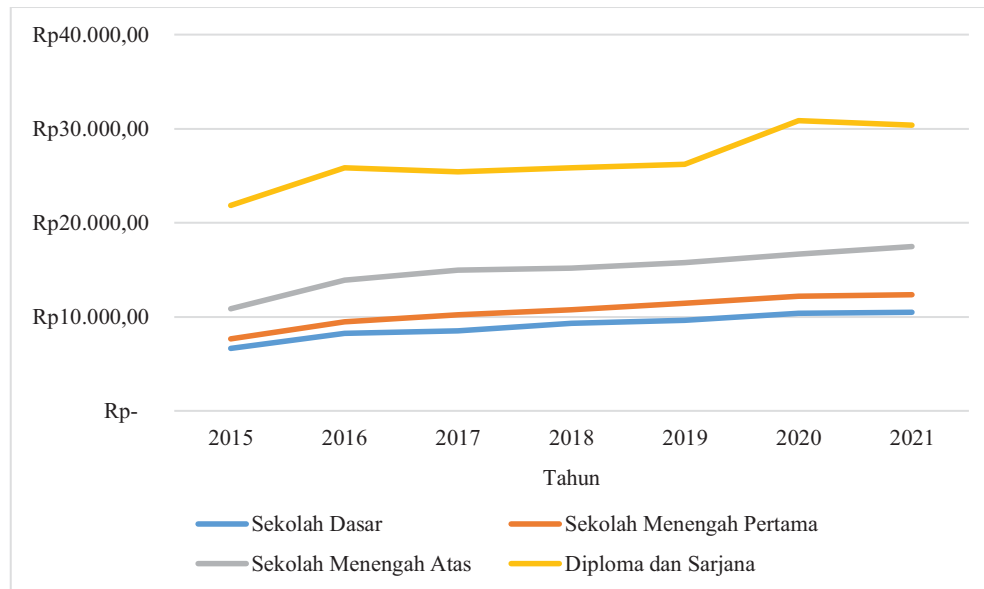
(Galiani & Sanguinetti, 2003). Hal tersebut disebabkan karena pola perdagangan negara maju yang cenderung menggunakan tenaga kerja terampil, sehingga pendapatan tenaga kerja terampil meningkat. Sedangkan produksi barang padat karya yang tidak menjadi keunggulan komparatifnya akan berkurang, dan pendapatan tenaga kerja tidak terampil ikut menurun. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan pendapatan di negara maju akibat liberalisasi perdagangan semakin tinggi. Berbeda dengan prediksi terhadap negara berkembang, dimana teori tersebut menyatakan jika liberalisasi perdagangan membawa dampak positif dengan menurunkan ketimpangan, karena negara berkembang menggunakan tenaga kerja tidak terampil dalam proses produksi barang padat karya (Atolia, 2007; Castilho dkk., 2012; Mehta & Hasan, 2012; Takahashi, 2021).

Dalam kasus negara berkembang, liberalisasi perdagangan juga mampu menurunkan kemiskinan. Penurunan hambatan tarif maupun non tarif yang menjadi dasar liberalisasi perdagangan telah membuka kesempatan kerja bagi tenaga kerja tidak terampil (Modeste, 2019). Dalam jangka panjang, pola tersebut akan berdampak pada pengurangan pengangguran dan peningkatan pendapatan rumah tangga miskin, sehingga tingkat kemiskinan menurun (Vos & de Jong, 2003; Acharya dkk., 2012). Dampak lain dari liberalisasi perdagangan dijelaskan melalui perubahan pendapatan masyarakat miskin dan peningkatan konsumsi masyarakat karena perubahan harga barang konsumsi dari kegiatan ekspor impor (Barraud & Calfat, 2008). Tidak hanya itu, meningkatnya rasio ekspor akibat liberalisasi perdagangan juga turut berkontribusi dalam menurunkan kemiskinan (Castilho dkk., 2012).

Meskipun perekonomian Indonesia telah mengarah pada sistem ekonomi terbuka, namun topik mengenai ketimpangan dan kemiskinan masih menjadi permasalahan menarik bagi negara berkembang. Gambar 1.1 menunjukkan rata-rata upah pekerja berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan. Berdasarkan grafik tersebut diperoleh informasi bahwa rata-rata upah per jam pekerja Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2015 - 2021. Kondisi ini dapat disebabkan oleh meningkatnya aliran masuk investasi asing ke dalam negeri, serta meningkatnya produktivitas perusahaan dalam negeri dan faktor

inflasi juga turut mempengaruhi peningkatan upah pekerja Indonesia (Kumar & Mishra, 2008).

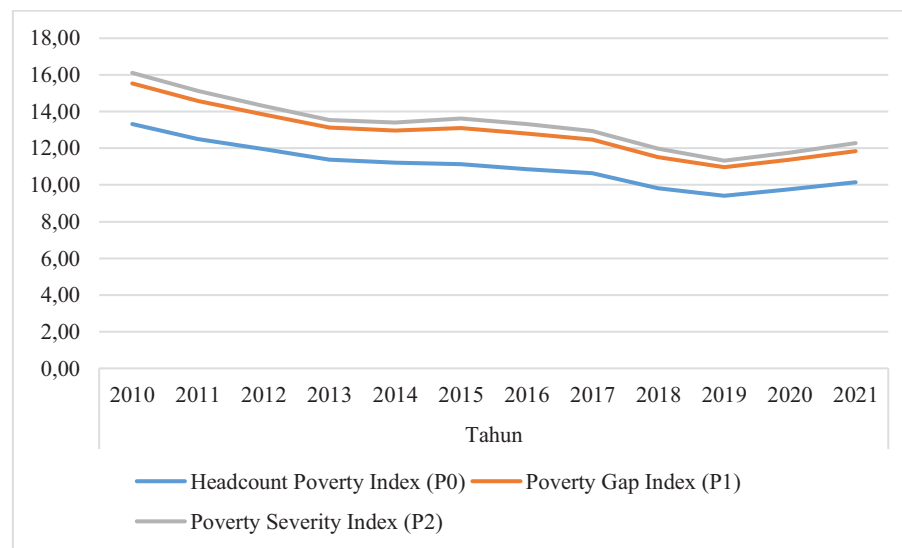
Pada kasus tersebut yang perlu diperhatikan adalah adanya *gap* yang cukup tinggi antara upah pekerja dengan pendidikan terakhir Diploma dan Sarjana dengan pekerja yang pendidikan terakhir dibawahnya. Hal tersebut dapat menjelaskan kondisi ketimpangan pendapatan di Indonesia antara pekerja terampil yang digambarkan oleh tenaga kerja lulusan diploma dan sarjana dengan pekerja tidak terampil, yaitu pekerja dengan pendidikan terakhir SD, SMP, SMA. Berdasarkan gambar 1.1, tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia antara pekerja terampil dan tidak terampil masih cukup tinggi. Tingginya ketimpangan tersebut tentu saja disebabkan oleh keterampilan yang mereka miliki, pekerja dengan pendidikan terakhir diploma/sarjana cenderung memiliki *skills*, sertifikasi dan kompetensi yang lebih tinggi, selain itu perkembangan teknologi yang cukup pesat juga turut menjadi salah satu faktor tingginya perbedaan upah.



Gambar 1. 1
Rata-Rata Upah Pekerja Indonesia per Jam Menurut Tingkat Pendidikan

Sumber: BPS (2022)

Seperti yang dijelaskan oleh Gambar 1.2, yang menjelaskan kondisi kemiskinan di Indonesia berdasarkan tiga ukuran kemiskinan. Berdasarkan ketiga ukuran kemiskinan, secara garis besar kondisi kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi penurunan kemiskinan di Indonesia. Beberapa diantaranya dapat dipengaruhi oleh tiga faktor yang saling terikat yaitu, kesehatan, pendidikan dan perekonomian, yang mana peningkatan perekonomian negara disebabkan oleh peningkatan produktivitas pekerja yang dipengaruhi oleh pendidikan yang tinggi dan tingkat kesehatan yang baik.

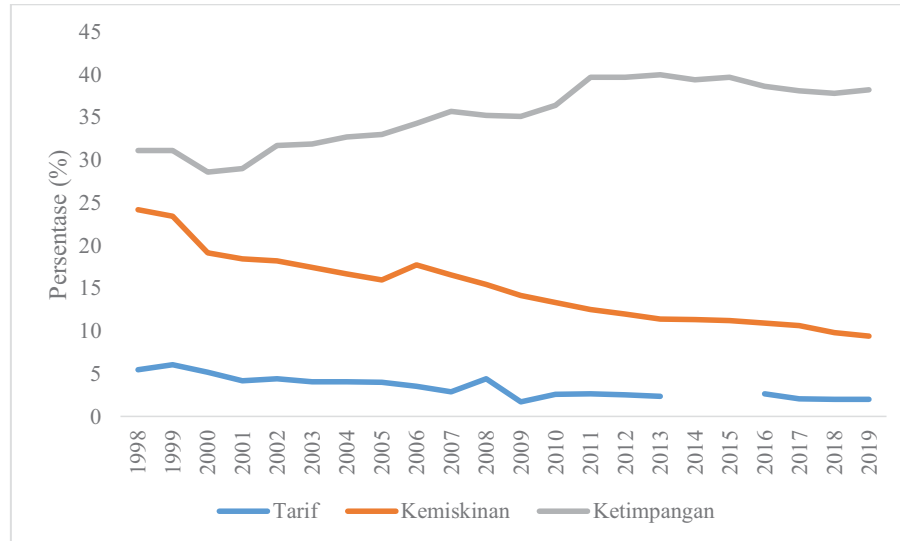


Gambar 1. 2
Kondisi Kemiskinan di Indonesia Berdasarkan Tiga Ukuran Kemiskinan

Sumber: BPS (2022)

Disisi lain *trend* dari ketimpangan, kemiskinan dan tarif dijelaskan oleh Gambar 1.3. Gambar tersebut menjelaskan kondisi dari ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia dari tahun 1998 – 2019, serta perkembangan tarif perdagangan Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa tarif perdagangan dari tahun 1998 - 2019 cenderung mengalami penurunan, di tahun yang sama kemiskinan di

Indonesia yang dilihat berdasarkan *headcount poverty index* juga mengalami penurunan, sedangkan untuk kondisi ketimpangan mengalami peningkatan.



Gambar 1.3
Kemiskinan, Ketimpangan, dan Tarif Perdagangan di Indonesia

Sumber: *World Bank*, BPS

Penelitian mengenai hubungan liberalisasi perdagangan dengan ketimpangan telah banyak dilakukan. Hasil dari penelitian tersebut masih menimbulkan banyak perdebatan, karena dampak dari liberalisasi perdagangan tidak sama antar negara. Penelitian di Chili yang dilakukan oleh Beyer dk., (1999), menyatakan jika liberalisasi perdagangan meningkatkan ketimpangan pendapatan antara tenaga kerja terampil dan tidak terampil. Hasil tersebut didukung oleh penelitian lain seperti yang dilakukan oleh (Fischer, 2001; Galiani & Sanguinetti, 2003). Atolia, (2007) menyatakan dalam jangka pendek perbedaan pendapatan akan meningkat yang disebabkan oleh meningkatnya ekspansi di sektor perdagangan. Akan tetapi, Barraud & Calfat, (2008) dalam penelitiannya menunjukkan hasil yang berbeda, dimana liberalisasi perdagangan di Argentina menurunkan ketimpangan. Melalui premi upah, liberalisasi perdagangan juga menurunkan ketimpangan di India (Kumar & Mishra, 2008).

Selain masalah mengenai ketimpangan, tingkat kemiskinan juga masih menjadi permasalahan yang harus diselesaikan. Terdapat beberapa ukuran yang dapat menjelaskan tingkat kemiskinan, namun *World Bank* telah menetapkan garis kemiskinan yang menjadi salah satu ukuran untuk melihat kondisi kemiskinan di berbagai negara. Tercatat pada tahun 2017 populasi dunia yang hidup masih di bawah garis kemiskinan yang telah ditetapkan *World Bank* yaitu sebesar \$1,90 per hari masih berkisar di angka 9,2% dari total seluruh populasi dunia (World Bank, 2020).

Sama halnya dengan dampak liberalisasi perdagangan terhadap ketimpangan. Dari sisi kemiskinan, penelitian mengenai dampak liberalisasi perdagangan juga memberikan hasil yang berbeda. Dalam jangka pendek, liberalisasi perdagangan menurunkan kemiskinan di daerah pedesaan maupun perkotaan (Nahar & Siriwardana, 2009). Sedangkan penelitian di beberapa negara bagian Brazil yang dilakukan oleh Castilho dkk. (2012) dan di Indonesia oleh Adha dkk., (2018), liberalisasi perdagangan membawa dampak buruk bagi peningkatan kemiskinan.

Untuk melihat lebih jauh lagi mengenai dampak liberalisasi perdagangan terhadap kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data *time series* pada tingkat *country*. Dengan menggunakan metode *Autoregressive Distributed Lag (ARDL)* untuk melihat hubungan jangka panjang antara liberalisasi perdagangan dengan kemiskinan dan ketimpangan. Lebih jauh lagi, penelitian ini berupaya untuk menganalisis pengaruh dari kebijakan pengurangan hambatan tarif terhadap kondisi ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia berdasarkan asumsi teori Heckscher-Ohlin-Samuelson.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Topik mengenai hubungan dari liberalisasi perdagangan dengan kemiskinan cukup banyak dibahas oleh peneliti terdahulu, namun hasil dari penelitian terdahulu masih menyatakan kesimpulan yang berbeda. Dengan berdasarkan pada teori Heckscher-Ohlin-Samuelson, ternyata dampak liberalisasi perdagangan terhadap kemiskinan dan ketimpangan di negara berkembang

maupun maju masih menimbulkan perbedaan hasil. Khususnya di Indonesia, beberapa hasil penelitian terdahulu menyatakan jika liberalisasi perdagangan justru berdampak pada peningkatan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Mayoritas penelitian terdahulu masih meneliti dampak liberalisasi perdagangan terhadap kemiskinan dan ketimpangan pendapatan secara terpidah. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha membuktikan dan menguji kembali pengaruh jangka panjang dari liberalisasi perdagangan terhadap dua isu sosial, yaitu ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di Indonesia dalam satu penelitian dengan menggunakan metode *ARDL*.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak liberalisasi perdagangan terhadap ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia dalam jangka panjang dengan menggunakan metode *ARDL*. Indonesia digunakan sebagai *study case* karena mewakili negara berkembang yang masih memiliki masalah dengan ketimpangan dan kemiskinan. Selain itu, penelitian terdahulu mengenai topik tersebut masih menghasilkan hasil yang berbeda. Beberapa hasil penelitian sesuai dengan teori yang sudah digunakan, yaitu teori Heckscher-Ohlin-Samuelson, namun juga ada hasil yang bertentangan dengan teori tersebut.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis dampak liberalisasi perdagangan terhadap ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di Indonesia adalah metode *Autoregressive Distributed Lag (ARDL)*. *ARDL* adalah salah satu alat analisis ekonometrika yang digunakan untuk memperhitungkan pengaruh jangka panjang dari variabel dependen terhadap variabel independen. Penggunaan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian, yaitu ingin melihat pengaruh jangka panjang dari liberalisasi perdagangan.

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Berdasarkan proses estimasi yang sudah dilakukan, diperoleh hasil bahwa pada model ketimpangan variabel tarif memiliki hubungan positif signifikan, artinya penurunan tarif (meningkatnya liberalisasi perdagangan) berdampak

terhadap menurunnya ketimpangan pendapatan di Indonesia. Variabel upah minimum dan rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif signifikan, sedangkan variabel FDI memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Pada model kemiskinan terdapat perbedaan hasil dari hipotesis dan teori, dimana variabel tarif yang seharusnya berpengaruh positif signifikan justru memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Untuk variabel PDB dan TPAK berhubungan negatif signifikan, dan tingkat pengangguran positif signifikan terhadap kemiskinan.

1.6 Kontribusi Riset

Kontribusi riset yang diberikan oleh penelitian ini untuk topik yang serupa terletak pada metode penelitian dan topik penelitian yang menggabungkan dua dampak sosial yang ditimbulkan oleh liberalisasi perdagangan dalam satu penelitian. Mayoritas penelitian terdahulu menggunakan metode *Computable General Equilibrium (CGE)* dan *Generalized Method of Moments (GMM)*, sedangkan pada penelitian kali ini menggunakan metode penelitian *Autoregressive Distributed Lag (ARDL)*. Disisi lain, penelitian mengenai dampak liberalisasi perdagangan terhadap permasalahan sosial (kemiskinan dan ketimpangan) masih diteliti secara terpisah. Untuk penelitian di Indonesia belum ada yang menggabungkan kedua kasus tersebut, sehingga peneliti bertujuan untuk mengangkat kedua dampak dari liberalisasi perdagangan terhadap kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia.

1.7 Sistematika Penulisan

Secara umum, penulisan dari penelitian ini disusun menjadi lima bab yang saling berhubungan. Pada Bab 1 berisi 7 sub bab meliputi, latar belakang, kesenjangan penelitian, tujuan penelitian, ringkasan metode penelitian, ringkasan hasil penelitian, kontribusi riset dan sistematika penulisan. Bab 2 berisi mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan teori yang diambil dari beberapa buku maupun penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Pada Bab 2 umumnya digunakan sebagai landasan penulis dalam memecahkan masalah dan merumuskan hipotesis penelitian. Bab 3 menjelaskan mengenai metode penelitian

yang digunakan, memaparkan model empiris, deskripsi operasional variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta teknik analisis. Pada Bab 4 fokus terhadap pembahasan dari hasil penelitian, yang dimulai dengan gambaran umum, deskripsi hasil penelitian, hasil estimasi, pembuktian hipotesis, serta interpretasi dan pembahasan. Pada bab terakhir, yaitu Bab 5 merupakan bagian kesimpulan yang berisi kesimpulan dari penelitian serta saran penelitian.